

**LAPORAN PELAKSANAAN PROGRAM/KEGIATAN PEMBANGUNAN  
APBD PROVINSI SUMATERA SELATAN  
BULAN DESEMBER TAHUN ANGGARAN 2019  
OPD : BAPENDA PROVINSI SUMATERA SELATAN**

**I. PENDAHULUAN**

**a. Gambaran Umum OPD**

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 74 Tahun 2016 Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi di Bidang Keuangan Sub Pendapatan Daerah.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Badan Pendapatan Daerah mempunyai fungsi:

- a. Perencanaan yang meliputi segala usaha dan kegiatan untuk merencanakan, mempersiapkan, mengelola, menelaah penyusunan rumusan kebijaksanaan teknis serta program kerja;
- b. Pelaksanaan yang meliputi segala usaha dan kegiatan untuk melaksanakan pemungutan dan pemasukan pendapatan daerah;
- c. Pelaksanaan ketatausahaan yang meliputi segala usaha dan kegiatan di bidang perencanaan, evaluasi, pelaporan, tata usaha, umum, kepegawaian, perlengkapan dan keuangan;
- d. Pengkoordinasian yang meliputi segala usaha yang berhubungan dengan peningkatan pendapatan asli daerah;
- e. Pengawasan yang meliputi segala usaha dan kegiatan untuk melaksanakan pengamanan teknis atau petunjuk pelaksanaan yang ditetapkan oleh Gubernur serta perundang-undangan yang berlaku;
- f. Pengkoordinasian penatausahaan, pemanfaatan dan pengamanan barang milik negara/daerah;

- g. Pembinaan terhadap UPTB; dan
- h. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Badan Pendapatan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Badan dibantu oleh seorang Sekretaris, 4 orang Kepala Bidang, yaitu Kepala Bidang Pajak, Kepala Bidang Pendapatan Lain-Lain, Hibah, Retribusi dan Penerimaan Pusat, Kepala Bidang Pengawasan dan Pembinaan, dan Kepala Bidang Pengembangan dan Pengolahan Pendapatan Daerah, dan Kepala Unit Pelaksana Teknis Badan.

## **1. Tujuan dan Sasaran**

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 74 Tahun 2016 Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi di Bidang Keuangan Sub Pendapatan Daerah. Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan menunjang visi Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2018-2023 yakni “Sumsel Maju Untuk Semua” dan menunjang Misi 3 yakni “Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bebas korupsi, kolusi dan nepotisme dengan mengedepankan transparansi dan akuntabilitas yang didukung aparatur pemerintahan yang jujur, berintegritas, profesional, dan responsif”.

Tujuan pelayanan Badan Pendapatan Daerah untuk meningkatkan pendapatan daerah, dengan indikator tingkat pertumbuhan pendapatan daerah.

Adapun sasaran jangka menengah pelayanan Badan Pendapatan Daerah Prov. Sumsel

1. Kemandirian Pendapatan Daerah, dengan indikator:

- Persentase peningkatan penerimaan PAD
- Rasio PAD terhadap Pendapatan Daerah non DAU dan DAK

2. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Bidang Pendapatan Daerah, dengan indikator:

- Nilai IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)

## **2. Program dan Kegiatan**

Total Pagu Anggaran Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan yang bersumber dari dana APBD-Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp.169.989.889.500,00 ,- yang terdiri atas :

Belanja Tidak Langsung	: Rp. 138.215.860.000,00
Belanja Langsung	: Rp. 31.774.029.500,00
➤ <i>Belanja Pegawai</i>	: Rp. 58.850.000,00
➤ <i>Belanja Barang dan Jasa</i>	: Rp. 24.575.179.500,00
➤ <i>Belanja Modal</i>	: Rp. 7.140.000.000,00

Belanja langsung tersebut terdiri atas 5 Program dan 38 Kegiatan, yaitu :

➤ **Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**, dengan kegiatan sebagai berikut :

1. Penyediaan Jasa Surat menyurat
2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
3. Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah
4. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional
5. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
6. Penyediaan Alat Tulis Kantor
7. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
8. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor
9. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
10. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
11. Penyediaan Makanan dan Minuman
12. Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi Teknis/Perkantoran
13. Penyediaan Jasa Tutor SKJ
14. Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah, Luar Daerah dan ke Luar Negeri.
15. Penyediaan Peralatan dan Bahan Pembersih

- **Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**, dengan kegiatan sebagai berikut :

16. Pembangunan Gedung Kantor
17. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
18. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
19. Pengadaan Mebeleur
20. Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
21. Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas
22. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
23. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor

- **Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**, dengan kegiatan sebagai berikut :

24. Kontribusi Pelatihan, Seminar, Simposium dll
25. Benchmarking Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah (DID Kinerja Perencanaan Terbaik)
26. Capacity Building SDM Aparatur Bidang Perencanaan (DID Kinerja Perencanaan Terbaik)
27. Benchmarking Peningkatan SAKIP Perangkat Daerah (DID Kinerja SAKIP dengan nilai A)
28. Bimbingan Teknis SAKIP Perangkat Daerah (DID Kinerja SAKIP dengan nilai A)

- **Program Pengelolaan Pendapatan Daerah**, dengan kegiatan sebagai berikut :

29. Razia Kendaraan Bermotor Alat Berat.
30. Razia Kendaraan Bermotor di Atas Air.
31. Razia Kendaraan Roda 2 dan Roda 4.
32. Pengawasan dan Pembinaan Penerimaan Pendapatan Daerah.
33. Pengembangan dan Pengelolaan PATDA
34. Intensifikasi Pendapatan Asli Daerah Bid. Pajak Daerah
35. Intensifikasi Pendapatan Asli Daerah Bidang Retribusi Daerah dan Lain-lain PAD yang sah
36. Media Informasi dan Publikasi Pajak Daerah

➤ **Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Bidang Pendapatan Daerah**, dengan kegiatan sebagai berikut :

37. Pemeliharaan dan Pengembangan Infrastruktur Pusat Pengelolaan Informasi dan Aplikasi Pendapatan Daerah
38. Pemeliharaan Database Colocation Server

**3. Indikator Kinerja OPD**

Sesuai dengan target yang tercantum dalam Rancangan RPJMD Provinsi Sumatera Selatan dan Rancangan Renstra Bapenda Provinsi Sumatera Selatan tahun 2018-2023, Indikator Kinerja yang menjadi tugas Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan adalah sebagai berikut :

1. Tingkat Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD)
2. Rasio PAD terhadap Pendapatan Daerah (PATDA) diluar DAU dan DAK
3. Nilai IKM (A)

**b. Latar Belakang Penyusunan Laporan**

Maksud dan Tujuan penyusunan laporan ini adalah sebagai Pedoman Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2019 serta sebagai bahan masukan OPD dalam menyusun perencanaan tahun berikutnya.

**II. EVALUASI KINERJA PELAKSANAAN PROGRAM/KEGIATAN PROVINSI SUMATERA SELATAN HINGGA BULAN INI**

Hasil evaluasi pelaksanaan program/kegiatan APBD Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2019 sampai dengan Bulan Desember Tahun Anggaran 2019 pada OPD Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan antara lain sebagai berikut :

a) **Realisasi Pelaksanaan Program/Kegiatan APBD Provinsi Sumatera Selatan**

Uraian	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Keuangan (%)		Fisik (%)	
			Target s.d. Bulan ini	Realisasi s.d. bulan ini	Target s.d Akhir Tahun	Realisasi s.d. bulan ini
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
<b>Total Belanja</b>	<b>169.989.889.500,00</b>	<b>152.323.260.466,00</b>	<b>100,00</b>	<b>89,61</b>	<b>100,00</b>	<b>89,61</b>
Belanja Tidak Langsung	138.215.860.000,00	125.162.777.335,00	100,00	90,56	100,00	90,56
Belanja Langsung	31.774.029.500,00	27.160.483.131,00	100,00	85,48	100,00	85,48
- Belanja Pegawai	58.850.000,00	28.800.000,00				
- Belanja Barang Jasa	24.575.179.500,00	20.317.242.558,00				
- Belanja Modal	7.140.000.000,00	6.81.440.573,00				

1) **Realisasi Total Belanja**

Realisasi Keuangan Total Belanja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan sampai dengan Bulan Desember Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp.152.323.260.466,00 atau 89.61% dan realisasi fisik 89.61 %.

2) **Realisasi Belanja Tidak Langsung**

Realisasi Keuangan Belanja Tidak Langsung Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan sampai dengan Bulan Desember Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp.125.162.777.335,00 atau 90.56% dan realisasi fisik 90.56 %.

3) **Realisasi Belanja Langsung**

i. Realisasi Keuangan Belanja Langsung Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan sampai dengan Bulan Desember Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp.27.160.483.131,00 atau 85.48% dan realisasi fisik 85.48%

ii. Realisasi Keuangan

Realisasi Keuangan masih rendah dengan realisasi keuangan 0-65 %  
Sampai dengan Bulan Desember Tahun Anggaran 2019 kegiatan yang  
realisasi keuangan masih rendah sebanyak 38 kegiatan sebagai berikut :

➤ **Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**, dengan kegiatan sebagai berikut:

1. Penyediaan Jasa Surat menyurat
2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
3. Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah
4. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional
5. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
6. Penyediaan Alat Tulis Kantor
7. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
8. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor
9. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
10. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
11. Penyediaan Makanan dan Minuman
12. Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi Teknis / Perkantoran
13. Penyediaan Jasa Tutor SKJ
14. Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah, Keluar Daerah dan ke Luar Negeri.
15. Penyediaan Peralatan dan Bahan Pembersih

➤ **Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**, dengan kegiatan sebagai berikut :

16. Pembangunan Gedung Kantor
17. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
18. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
19. Pengadaan Mebeleur

20. Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
21. Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas
22. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
23. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor

➤ **Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**, dengan kegiatan sebagai berikut :

23. Kontribusi Pelatihan, Seminar, Simposium dll
24. Benchmarking Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah (DID Kinerja Perencanaan Terbaik)
25. Capacity Building SDM Aparatur Bidang Perencanaan (DID Kinerja Perencanaan Terbaik)
26. Benchmarking Peningkatan SAKIP Perangkat Daerah (DID Kinerja SAKIP dengan nilai A)
27. Bimbingan Teknis SAKIP Perangkat Daerah (DID Kinerja SAKIP dengan nilai A)

➤ **Program Pengelolaan Pendapatan Daerah**, dengan kegiatan sebagai berikut :

28. Razia Kendaraan Bermotor Alat Berat
29. Razia Kendaraan Bermotor di Atas Air
30. Razia Kendaraan Roda 2 dan Roda 4
31. Pengawasan dan Pembinaan Penerimaan Pendapatan Daerah
32. Pengembangan dan Pengelolaan PATDA
33. Intensifikasi Pendapatan Asli Daerah Bid. Pajak Daerah
34. Intensifikasi Pendapatan Asli Daerah Bidang Retribusi Daerah dan Lain-lain PAD yang sah
35. Media Informasi dan Publikasi Pajak Daerah



➤ **Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Bidang Pendapatan Daerah**, dengan kegiatan sebagai berikut :

36. Pemeliharaan dan Pengembangan Infrastruktur Pusat Pengelolaan Informasi dan Aplikasi Pendapatan Daerah
37. Pemeliharaan Database Colocation Server

iii. Realisasi Fisik

Realisasi fisik masih rendah dengan realisasi 0-65 %

sampai dengan Bulan Desember Tahun Anggaran 2019 kegiatan yang realisasi Fisik masih rendah sebanyak 38 kegiatan sebagai berikut :

➤ **Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**, dengan kegiatan sebagai berikut:

1. Penyediaan Jasa Surat menyurat
2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
3. Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah
4. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional
5. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
6. Penyediaan Alat Tulis Kantor
7. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
8. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
9. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
10. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
11. Penyediaan Makanan dan Minuman
12. Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi Teknis Perkantoran
13. Penyediaan Jasa Tutor SKJ
14. Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah, Luar Daerah dan ke Luar Negeri
15. Penyediaan Peralatan dan Bahan Pembersih

➤ **Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**, dengan kegiatan sebagai berikut :

16. Pembangunan Gedung Kantor
17. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
18. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
19. Pengadaan Mebeleur
20. Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
21. Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas
22. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
23. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor

➤ **Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**, dengan kegiatan sebagai berikut :

24. Kontribusi Pelatihan, Seminar, Simposium dll
25. Benchmarking Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah (DID Kinerja Perencanaan Terbaik)
26. Capacity Building SDM Aparatur Bidang Perencanaan (DID Kinerja Perencanaan Terbaik)
27. Benchmarking Peningkatan SAKIP Perangkat Daerah (DID Kinerja SAKIP dengan nilai A)
28. Bimbingan Teknis SAKIP Perangkat Daerah (DID Kinerja SAKIP dengan nilai A)

➤ **Program Pengelolaan Pendapatan Daerah**, dengan kegiatan sebagai berikut :

29. Razia Kendaraan Bermotor Alat Berat
30. Razia Kendaraan Bermotor di Atas Air
31. Razia Kendaraan Roda 2 dan Roda 4
32. Pengawasan dan Pembinaan Penerimaan Pendapatan Daerah

- 33. Pengembangan dan Pengelolaan PATDA
- 34. Intensifikasi Pendapatan Asli Daerah Bid. Pajak Daerah
- 35. Intensifikasi Pendapatan Asli Daerah Bidang Retribusi Daerah dan Lain-lain PAD yang sah
- 36. Media Informasi dan Publikasi Pajak Daerah

➤ **Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Bidang Pendapatan Daerah**, dengan kegiatan sebagai berikut :

- 37. Pemeliharaan dan Pengembangan Infrastruktur Pusat Pengelolaan Informasi dan Aplikasi Pendapatan Daerah
- 38. Pemeliharaan Database Colocation Server

**b) Indikator Kinerja SKPD**

Capaian Indikator Kinerja sesuai dengan Renstra Bapenda Tahun 2019-2023:

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi
1	Tingkat Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	%	2.5 – 3.5	-1.45
2	Rasio PAD terhadap Pendapatan Daerah (PATDA) diluar DAU dan DAK	%	> 45	61
3	Nilai IKM	-	A	A

Capaian Indikator Kinerja sesuai dengan Renstra Bapenda untuk Tahun 2019 tingkat pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) mengalami penurunan 1.45%, untuk Rasio PAD terhadap Pendapatan Daerah (PATDA) diluar DAU dan DAK sebesar 61% melampaui target 45%. Sedangkan indikator nilai IKM untuk tahun 2019 mencapai predikat A.

Rincian Target dan Realisasi Pendapatan Daerah (PATDA) Tahun 2019 sebagai berikut:

**TARGET DAN REALISASI PENERIMAAN PENDAPATAN DAERAH (PATDA)**

**PROVINSI SUMATERA SELATAN S.D 31 DESEMBER 2019**

NO.	URAIAN	Target 2019	REALISASI	%
	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>9.849.942.842.746,55</b>	<b>9.282.805.018.028,87</b>	<b>94,24</b>
<b>1</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH SENDIRI (PAD)</b>	<b>3.436.828.903.746,55</b>	<b>3.496.573.798.831,87</b>	<b>101,74</b>
	<b>A. PAJAK DAERAH</b>	<b>3.071.784.718.796,00</b>	<b>3.145.558.634.339,38</b>	<b>102,40</b>
	<b>PKB</b>	<b>905.040.000.000,00</b>	<b>979.347.884.263,00</b>	<b>108,21</b>
	-PKB R2/R4	900.000.000.000,00	974.117.378.669,00	108,24
	-PKB Alat Berat	4.800.000.000,00	4.986.889.104,00	103,89
	-PKAA	240.000.000,00	243.616.490,00	101,51
	<b>BBN - KB</b>	<b>913.245.000.000,00</b>	<b>932.817.466.919,00</b>	<b>102,14</b>
	-BBN-KB R2/R4	910.000.000.000,00	929.917.321.275,00	102,19
	-BBN-KB Alat Berat	3.170.000.000,00	2.870.674.594,00	90,56
	-BBN-KAA	75.000.000,00	29.471.050,00	39,29
	<b>PBB-KB</b>	<b>760.000.000.000,00</b>	<b>831.263.590.286,08</b>	<b>109,38</b>
	<b>PAP</b>	<b>10.965.000.000,00</b>	<b>12.323.588.808,30</b>	<b>112,39</b>
	<b>PAJAK ROKOK</b>	<b>482.534.718.796,00</b>	<b>389.806.104.063,00</b>	<b>80,78</b>
	<b>B. RETRIBUSI DAERAH</b>	<b>9.136.079.600,00</b>	<b>12.026.552.325,00</b>	<b>131,64</b>
	<b>C. Hsl. Peng. Kekayaan Daerah yg Dipisahkan</b>	<b>89.676.728.820,00</b>	<b>90.943.255.859,82</b>	<b>101,41</b>
	<b>D. Lain-lain PAD yang Sah</b>	<b>266.231.376.530,55</b>	<b>248.045.356.307,67</b>	<b>93,17</b>
<b>2</b>	<b>BAGI AN DANA PERIMBANGAN</b>	<b>6.315.428.531.000,00</b>	<b>5.698.701.179.582,00</b>	<b>90,23</b>
	<b>A. BAGI HASIL PAJAK</b>	<b>840.958.514.000,00</b>	<b>539.052.382.800,00</b>	<b>64,10</b>
	<b>PBB</b>	<b>622.281.745.000,00</b>	<b>412.413.389.500,00</b>	<b>66,27</b>
	Bagi Hasil Pajak Penghasilan (pasal 21)	201.962.101.000,00	121.177.260.600,00	60,00
	Bagi Hasil Pph WPOPDN (Pasal 25/29)	8.015.492.000,00	4.809.295.200,00	60,00
	Cukai Hasil Tembakau (CHT)	8.699.176.000,00	652.437.500,00	7,50
	<b>B. BAGI HASIL BUKAN PAJAK SDA</b>	<b>1.292.773.158.000,00</b>	<b>765.859.971.850,00</b>	<b>59,24</b>
	Iuran Hasil Hutan/Provinsi Sumber Daya Hutan (PSDH)	9.878.044.000,00	5.926.826.400,00	60,00
	DR (Dana Reboisasi)	2.604.400.000,00	-	0,00
	Landrent	8.766.484.000,00	6.136.538.800,00	70,00
	Expolrasi (Royalty)	362.884.993.000,00	254.019.495.100,00	70,00
	Minyak Bumi	164.775.018.000,00	90.626.259.900,00	55,00
	Gas Alam	743.694.011.000,00	409.031.706.050,00	55,00
	Panas Bumi	170.208.000,00	119.145.600,00	70,00
	<b>C. DANA ALOKASI UMUM</b>	<b>1.743.742.960.000,00</b>	<b>1.743.742.960.000,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>D. DANA ALOKASI KHUSUS (FISIK + NON FISIK)</b>	<b>2.357.953.899.000,00</b>	<b>2.259.489.236.940,00</b>	<b>95,82</b>
	DAK FISIK	267.864.216.000,00	231.438.283.947,00	86,40
	DAK NON FISIK	2.090.089.683.000,00	2.028.050.952.993,00	97,03
	<b>E. Kurang Salur DBH Tahun 2018</b>	<b>80.000.000.000,00</b>	<b>390.556.627.992,00</b>	<b>488,20</b>
<b>3</b>	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YG SAH</b>	<b>97.685.408.000,00</b>	<b>87.530.039.615,00</b>	<b>89,60</b>
	<b>Pendapatan hibah</b>	<b>30.253.041.000,00</b>	<b>20.415.551.615,00</b>	<b>67,48</b>
	1. Alokasi Dana dari IPDMIP	26.713.041.000,00	8.777.052.615,00	32,86
	2. Jasa Raharja	3.540.000.000,00	3.540.000.000,00	100,00
	3. BPPB-RI	-	8.098.499.000,00	
	<b>Dana Insentif Daerah</b>	<b>66.475.238.000,00</b>	<b>66.475.238.000,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>Pendapatan Lainnya</b>	<b>957.129.000,00</b>	<b>639.250.000,00</b>	<b>66,79</b>
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>9.849.942.842.746,55</b>	<b>9.282.805.018.028,87</b>	<b>94,24</b>

Catatan : Data realisasi adalah data sementara hasil rekon (belum audit)

### **III. KENDALA YANG DIHADAPI DAN SARAN TINDAK LANJUT**

Sampai dengan akhir Bulan Desember Tahun Anggaran 2019, realisasi belanja mencapai 89,61% dibawah target dikarenakan penambahan anggaran pada perubahan APBD 2019 yang diperuntukan untuk operasional 8 UPTB baru (selama 6 bulan) tidak dapat dilaksanakan secara penuh (2 bulan) sehingga anggaran tidak dapat terserap secara optimal.

### **IV. PENUTUP**

Demikianlah penjelasan kami mengenai program/kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Bapenda Provinsi Sumatera Selatan dalam rangka Laporan Pelaksanaan Program/Kegiatan Pembangunan APBD Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2019 untuk dapat menjadi bahan evaluasi yang diperlukan, selanjutnya **laporan yang lebih terinci menjadi lampiran** pada dokumen ini. Demikian disampaikan untuk dapat dimaklumi dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palembang, Januari 2020

**KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH  
PROVINSI SUMATERA SELATAN,**

**Dra. Hj. Neng Muhaiba, M.M**  
Pembina Utama Muda IV/c  
NIP. 196511121995122001